# BAB II

**Pengembangan Nuklir Korea Utara**

* 1. **Sejarah Korea Utara**

Korea Utara, secara resmi disebut Republik Demokratik Rakyat Korea (Hangul: 조선민주주의인민공화국, Hanja: 朝鮮民主主義人民共和國, Chosŏn Minjujuŭi Inmin Konghwaguk) adalah sebuah negara di Asia Timur, yang meliputi sebagian utara Semenanjung Korea. Ibu kota dan kota terbesarnya adalah Pyongyang. Zona Demiliterisasi Korea menjadi batas antara Korea Utara dan Korea Selatan. Sungai Amnok dan Sungai Tumen membentuk perbatasan antara Korea Utara dan Republik Rakyat Tiongkok. Sebagian dari Sungai Tumen di timur laut merupakan perbatasan dengan Rusia. Penduduk setempat menyebut negara ini Pukchosŏn (북조선, "Chosŏn Utara").

Semenanjung Korea diperintah oleh Kekaisaran Korea hingga dianeksasi oleh Jepang setelah Perang Rusia-Jepang tahun 1905. Setelah kekalahan Jepang pada Perang Dunia II, Korea dibagi menjadi wilayah pendudukan Soviet dan AS. Korea Utara menolak ikut serta dalam pemilihan umum yang diawasi PBB yang diselenggarakan di selatan pada 1948, yang mengarah kepada pembentukan dua pemerintahan Korea yang terpisah oleh zone demiliterisasi. Baik Korea Utara maupun Korea Selatan kedua-duanya mengklaim kedaulatan di atas seluruh semenanjung, yang berujung kepada Perang Korea tahun 1950. Sebuah gencatan senjata pada 1953 mengakhiri pertempuran; namun kedua negara secara resmi masih berada dalam status perang, karena perjanjian perdamaian tidak pernah ditandatangani.[[1]](#footnote-1) Kedua negara diterima menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 1991.[[2]](#footnote-2) Pada 26 Mei 2009, Korea Utara secara sepihak menarik diri dari gencatan senjata.

Korea Utara termasuk dalam negara satu-partai di bawah front penyatuan yang dipimpin oleh Partai Buruh Korea. Pemerintahan negara mengikuti ideologi Juche, yang digagas oleh Kim Il-sung, mantan pemimpin negara ini. Juche menjadi ideologi resmi negara ketika negara ini mengadopsi konstitusi baru pada 1972,[[3]](#footnote-3) kendati Kim Il-sung telah menggunakannya untuk membentuk kebijakan sejak sekurang-kurangnya awal tahun 1955. Sementara resminya sebagai republik sosialis, Korea Utara dipandang oleh sebagian besar negara sebagai negara kediktatoran totaliter stalinis.[[4]](#footnote-4) Setelah kematian Kim Jong-il pada tanggal 19 Desember 2011, diperkirakan pemimpin Korea Utara berikutnya adalah Kim Jong-un, anak termuda Kim Jong-il.

Pada Agustus 1945, Tentara Soviet membentuk Otoritas Sipil Soviet untuk memerintah negara ini hingga sebuah rezim domestik, yang bersahabat dengan Uni Soviet, dapat dibentuk. Setelah mundurnya tentara Soviet pada 1948, agenda utama pada tahun berikutnya adalah penyatuan Korea dari kedua belah pihak, namun konsolidasi rezim Syngman Rhee di Selatan dengan dukungan militer Amerika dan penekanan pemberontakan pada Oktober 1948 mengakhiri harapan bahwa negara ini dapat disatukan kembali menurut cara revolusi Komunis. Pada 1949, rezim Utara mempertimbangkan untuk melakukan intervensi militer ke Korea Selatan, tetapi gagal mendapat dukungan dari Uni Soviet.[[5]](#footnote-5)

Penarikan kekuatan militer AS dari Selatan pada Juni memperlemah Rezim Selatan dan membuat Kim Il-sung mempertimbangkan kembali rencana invasi ke Selatan. Gagasan itu sendiri awalnya ditolak oleh Joseph Stalin, tetapi dengan perkembangan persenjataan nuklir Soviet, kemenangan Mao Zedong di Tiongkok, dan pertanda dari bangsa Tiongkok bahwa mereka dapat mengirimkan serdadu dan sokongan lainnya ke Korea Utara, Stalin menyetujui penyerangan yang menjadi cikal bakal Perang Korea.[[6]](#footnote-6)

* 1. **Perang Korea Utara dan Korea Selatan**

Perang Korea adalah perang antara Korea Utara dan Korea Selatan yang dimulai pada 25 Juni 1950. Perang ini sempat berhenti sementara dengan gencatan senjata yang ditandatangani pada 27 Juli 1953. Konflik diakibatkan oleh pembagian Korea dan upaya kedua Korea untuk menyatukan kembali Korea di bawah pemerintahan mereka masing-masing. Perang ini menewaskan lebih dari 2 juta penduduk dan prajurit dari kedua belah pihak. Periode sebelum perang ditandai dengan konflik perbatasan pada paralel utara ke-38 dan upaya negosiasi pemilihan umum bagi keutuhan Korea[[7]](#footnote-7). Negosiasi berakhir ketika Tentara Rakyat Korea menyerbu Korea Selatan pada 25 Juni 1950. Di bawah restu PBB, AS dan sekutunya mendukung Korea Selatan. Setelah serangan balasan Korea Selatan, tentara Tiongkok mendukung Korea Utara, dan pada akhirnya mengarah kepada gencatan senjata yang hampir memulihkan kembali perbatasan awal antara Korea Utara dan Korea Selatan.

Sejak gencatan senjata tahun 1953, hubungan antara pemerintah Korea Utara dengan Korea Selatan, Uni Eropa, Kanada, AS, dan Jepang tetap tegang. Pertempuran dihentikan dengan gencatan senjata, tetapi kedua Korea secara teknis masih berada dalam keadaan perang. Baik Korea Utara maupun Selatan menandatangani Deklarasi Gabungan Utara-Selatan 15 Juni pada tahun 2000, ketika kedua pihak berjanji untuk mengupayakan penyatuan kembali dengan cara damai[[8]](#footnote-8). Selain itu pada 4 Oktober 2007, para pemimpin dari Utara dan Selatan bergandengan tangan untuk mengadakan rapat puncak yang membicarakan pernyataan penghentian perang secara resmi dan mengukuhkan kembali prinsip non-agresi[[9]](#footnote-9).

Korea Utara dan Selatan tidak pernah menandatangani perjanjian perdamaian dan dengan demikian secara resmi masih dalam status perang; hanya sebuah gencatan senjata yang diumumkan.[[10]](#footnote-10) Upaya perdamaian disela oleh beberapa pertempuran kecil dan upaya pembunuhan. Korea Utara gagal di dalam beberapa upaya pembunuhan terhadap pemimpin Korea Selatan, dengan yang paling dikenal pada 1968, 1974, dan Pengeboman Rangoon pada 1983. Terowongan seringkali ditemukan di bawah Zona Demiliterisasi, dan perang hampir meletus akibat Insiden Pembunuhan Kapak di Panmunjeom pada 1976.[[11]](#footnote-11) Pada 1973, hubungan tingkat tinggi yang sangat rahasia mulai dilakukan melalui kantor-kantor Palang Merah, tetapi berakhir setelah insiden Panmunjeom dengan sedikit kemajuan.[[12]](#footnote-12)

Pada akhir tahun 1990-an, ketika Korsel mengalami transisi menjadi demokratis, keberhasilan Nordpolitik dan dengan diambil alihnya kekuasaan di utara oleh putra Kim Il-sung, Kim Jong-il, maka kedua negara untuk pertama kalinya mulai berhubungan secara terbuka, dengan Korea Selatan yang menyatakan Kebijakan Sinar Matahari.[[13]](#footnote-13)

Pada 2002, Presiden AS George W. Bush menjuluki Korea Utara sebagai bagian dari "poros setan" dan "pos terdepan tirani". Hubungan tingkat tinggi yang pernah dilakukan pemerintah Korea Utara dengan AS adalah kunjungan Menteri Luar Negeri AS Madeleine Albright ke Pyongyang pada tahun 2000,[[14]](#footnote-14) meskipun kedua negara tidak menjalin hubungan diplomatik yang resmi. Pada tahun 2006, hampir 37.000 serdadu Amerika masih berada di Korea Selatan, meski sejak Juni 2009 jumlah ini berkurang menjadi sekitar 30.000 saja.[[15]](#footnote-15) Kim Jong-il secara pribadi menerima kehadiran tentara AS di Semenanjung Korea. Bagaimanapun, secara umum, Korea Utara sangat menuntut penarikan serdadu Amerika dari Korea.[[16]](#footnote-16)

Pada 13 Juni 2009, kantor berita AS, Associated Press, melaporkan bahwa sebagai tanggapan bagi sanksi-sanksi baru dari PBB, Korea Utara menyatakan bahwa pihaknya akan melanjutkan program pengayaan uranium. Hal ini menandai bahwa untuk pertama kalinya, pemerintah Korea Utara mengakui di depan dunia bahwa pihaknya memang melakukan program pengayaan uranium.[[17]](#footnote-17) Pada 5 Agustus 2009, mantan presiden AS, Bill Clinton bertemu dengan Kim Jong-il untuk menjamin pembebasan dua orang wartawan AS, Laura Ling dan Euna Lee, yang ditangkap karena memasuki Korea Utara secara ilegal.[[18]](#footnote-18) Pada 28 Agustus 2010 mantan Presiden AS, Jimmy Carter, berhasil membawa pulang seorang guru dan aktivis AS, Aijalon Mahli Gomes, yang ditangkap karena memasuki Korea Utara secara ilegal.[[19]](#footnote-19)

* 1. **Program Nuklir Korea Utara**

Program nuklir Korea Utara dimulai pada tahun 1956 ketika sebuah perjanjian dengan Uni Soviet dalam kerjasama penggunaan damai energi nuklir ditandatangani. Dalam perjanjian ini, Korea Utara mulai mengirim para ilmuwan dan teknisi ke Uni Soviet untuk mendapatkan pelatihan dalam program Moscow yang bertujuan untuk melatih para ilmuwan dari negara komunis lain.[[20]](#footnote-20) Sebagian besar generasi pertama ilmuwan nuklir Korea Utara dilatih dalam program ini. Namun teknologi yang dimiliki mereka tidak cukup maju untuk memproduksi senjata nuklir tanpa bantuan dari negaranegara lain.

Pada tahun 1964, China dengan sukses menguji bom nuklir pertamanya.[[21]](#footnote-21) Korea Utara mendekati China untuk mempelajari teknologi senjata nuklir. Namun Korea Utara ditanggapi dengan dingin oleh China sehingga Korea Utara makin mempererat kerjasamanya dengan Moscow dan Kim Il Sung mulai berpikir untuk mengembangkan kapabilitas rudal balistik sendiri.

Tahun 1965 ditandai dengan pendirian Akademi Militer Hamhung, dimana para tentara Korea Utara menerima pelatihan pengembangan rudal.[[22]](#footnote-22) Uni Soviet pada tahun ini juga mulai menyediakan bantuan secara meluas kepada Korea Utara dalam membangun pusat penelitian di Yongbyon. Fasilitas nuklir yang dikembangkan pertama kali oleh Korea Utara ini adalah reaktor nuklir model Uni Soviet yang dioperasikan untuk tujuan penelitian di Yongbyon, Korea Utara. Di tempat ini Uni Soviet membantu Korea Utara untuk menjalankan reaktor nuklir berdaya 5MW. Reaktor ini sangat kecil sehingga tidak menjadi perhatian negara-negara sekitar karena membutuhkan waktu bertahun-tahun bagi reaktor tersebut untuk memproduksi plutonium yang cukup dan menjadi sebuah bom nuklir. Fasilitas nuklir ini juga dilaksanakan secara independen dan terfokus pada lingkaran bahan bakar nuklir (penyulingan bahan bakar nuklir dan perubahan).

Dengan adanya fasilitas nuklir di Yongbyon, Korea Utara memperoleh plutonium dan mulai menguasai teknologi nuklir yang mendorong Kim Il Sung memutuskan untuk membangun senjata nuklir. Bagi Korea Utara, senjata nuklir akan membuat Korea Utara lebih kuat dari Korea Selatan. Selain itu senjata nuklir dapat menangkal serangan AS dan memperkecil ketergantungan Korea Utara terhadap Uni Soviet dan China. Senjata nuklir juga memberikan jaminan keamanan bagi Korea Utara yang selama ini tidak ditawarkan oleh negara manapun dalam komunitasinternasional. Lebih jauh lagi, dikarenakan Korea Utara menghadapi situasi keamanan yang lemah terutama sepanjang Perang Korea, pengembangan senjata nuklir menjadi sumber keamanan rezim bagi Kim Il Sung dan pemimpin-pemimpin berikutnya.[[23]](#footnote-23)

Korea Utara mulai meningkatkan kekuatan militernya pada tahun 1960-an. Doktrin dan struktur kekuatan militer Korea Utara saat itu berorientasi ofensif.[[24]](#footnote-24) Secara keseluruhan, pada tahun 1960-an, Korea Utara berusaha memproduksi ataupun memperoleh roket, rudal, dan pengembangan sumber daya manusia guna mendukung program rudalnya. Ada beberapa alasan politis dan keamanan yang mendorong Korea Utara pada masa ini untuk mengembangkan kapabilitas rudal dan nuklirnya. Dari segi eksternal, alasan keamanan pertama adalah intervensi AS pada Perang Korea menghalangi tujuan Kim Il Sung dalam menyatukan Korea melalui kekuatan militer. Kim Il Sung beranggapan bahwa nuklir merupakan senjata yang dapat menangkal atau mengalahkan pasukan AS dalam situasi konflik.

Kedua, aliansi Korea Utara dengan Uni Soviet dan China yang sering mengalami pasang surut membuat Kim Il Sung mempertanyakan kredibilitas komitmen Moscow serta Beijing untuk membantu Korea Utara menghadapi perang lainnya.[[25]](#footnote-25)

Alasan keamanan lainnya dari segi internal dikarenakan Korea Utara memiliki ideologi yang disebut Juche. Juche pertama kali diperkenalkan oleh Kim Il Sung pada tahun 1950-an sebagai ideologi resmi negara yang kemudian menonjol pada tahun 1960-an. Juche diartikan sebagai kepercayaan diri yang lebih luas lagi dipahami sebagai sikap mandiri dalam memenuhi kebutuhan sendiri tanpa tergantung negara lain. Juche merupakan inti dari kontrol politik yang dimiliki Kim Il Sung. Perang Korea memberikan kesempatan baik bagi Korea Utara untuk memperdalam militerisasi dan ideologi juche karena militer merupakan tulang punggung rezim Kim Il Sung. Sepanjang tahun 1950-an miiliter Uni Soviet telah membantu Korea Utara meningkatkan *military-industrial-complex* yang pada masa itu telah mencapai 300.000 pasukan.[[26]](#footnote-26)

Selain ideologi Juche tersebut, Korea Utara juga memiliki Empat Garis Besar Militer guna mendukung rezim pemerintahan Kim Il Sung maupun pertahanan negara. Empat Garis Besar Militer Korea Utara yang dikeluarkan oleh Kim Il Sung:[[27]](#footnote-27)

1. Mempersenjatai semua warga negara memperkuat seluruh negeri
2. Melatih semua anggota angkatan darat menjadi “*cadre army*” (kader tentara)
3. Melakukan modernisasi semua angkatan darat, doktrin, dan taktik di bawah prinsip kepercayaan diri terhadap pertahanan nasional.

Untuk menunjang kekuatan militer konvensional yang lemah, maka Korea Utara berusaha untuk mengembangkan nuklir. Program nuklir yang dilakukan Korea Utara pada masa ini memiliki tujuan:[[28]](#footnote-28)

1. Meningkatkan kekuatan untuk mencapai posisi setara dengan Korea Selatan.
2. Menambah kewibawaan dan pengaruh Korea Utara dalam hubungan antar negara di dunia.
3. Digunakan sebagai sarana pemerasan agar mendapatkan keuntungan dari Korea Selatan.
4. Sebagai strategi penyeimbang terhadap persenjataan Korea Selatan.

Sementara itu alasan politis Korea Utara lebih dilandasi kepentingan untuk menaikan posisi tawar (*bargaining position*) Korea Utara di tingkat internasional. Ini berkaitan dengan sikap komunitas internasional yang berusaha mengasingkan dan bersikap keras terhadap Korea Utara. Senjata nuklir akan digunakan untuk menekan komunitas internasional agar melibatkan Korea Utara di dalam percaturan global. Selain juga untuk memajukan kepentingan-kepentingan Korea Utara seperti, mencabut sanksi keuangan internasional yang diterimanya

* 1. **Faktor-faktor Pendorong Korea Utara dalam Mengembangkan Senjata Nuklir**

Mengapa sampai saat ini Korea Utara berusaha mengembangkan nuklir disebabkan oleh beberapa faktor. Berakhirnya Perang Dingin menandai berakhirnya pula bantuan bagi Korea Utara yang selama itu datang dari blok komunis. Walaupun konsentrasi persenjataan negara ini masih sangat tinggi, pimpinan militer menyadari kekuatan militer konvensional mereka kalah jauh dari lawan potensial mereka, seperti Jepang, Korea Selatan, dan AS. Oleh karena itu, senjata nuklir lantas dipilih sebagai langkah *deterrence* jangka panjang yang kredibel.

Terdapat beberapa kemungkinan skenario pengembangan nuklir Korea Utara.[[29]](#footnote-29) Pertama, Pyongyang berusaha berkomunikasi dengan Korea Selatan yang selama ini merasakan sikap permusuhan dari Korea Utara. Kedua, Korea Utara menginginkan perhatian Washington. Ketiga, pemerintahan Korea Utara bermaksud untuk memperkuat legitimasi politik pengganti Kim Jong Il, Kim Jong Un. Keempat, Pyongyang bermaksud mengembangkan gudang senjata nuklir untuk digunakan melawan Korea Selatan, Jepang, dan atau AS.

Berikut adalah tabel pengelolaan plutonium dan parameter uji coba nuklir yang dilakukan Korea Utara:

Tabel 2.1. Pengelolaan Plutonium Korea Utara

|  |  |
| --- | --- |
| Produksi Plutonium | Pengelolaan Plutonium |
| Tahun | Jumlah (Kg) | Tahun | Jumlah (Kg) |
| Sebelum tahun 199019942005July 2007 | 1-1027-2913-1710-13 | 1989-19922003-20042005-20062009 | 0-1020-2813-178-12 |
| Total  | 51-69 | Total  | 41-67 |

Sumber: *Asian Perspective*, Vol. 33, No. 4, 2009, hlm. 153.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa selama dua dekade terakhir Korea Utara memiliki kesempatan untuk melakukan ekstrasi bahan bakar yang mengandung hingga 69 kilogram plutonium.

Tabel 2.2. Parameter Uji Coba Nuklir Korea Utara

|  |  |
| --- | --- |
| Tanggal uji coba nuklir | Perkiraan hasil |
| 9 Oktober 200625 Mei 2009 | 0,5-0,8 kiloton2,0-4,0 kiloton |

Sumber: *Asian Perspective*, Vol. 33, No. 4, 2009, hlm. 155

Tabel di atas menegaskan bahwa uji coba nuklir Korea Utara yang kedua lebih sukses daripada sebelumnya. Jika jumlah plutonium yang digunakan sama seperti uji coba pertama, maka dipastikan Korea Utara memiliki tekonologi yang lebih maju. Lebih dari militerisme secara umum, program nuklir Korea Utara dianggap sebagai suatu upaya untuk kelangsungan bangsa. Dengan memainkan kartu nuklir, Korea Utara terhubung langsung dengan AS untuk mendapatkan semacam jaminan untuk kelangsungannya.

Pertunjukan nuklir Korea Utara yang programnya menelan keuangan negara habis-habisan muncul sebagai manifestasi dua doktrin yang menuntun tindakan para perwira militer dan menentukan postur politik Korea Utara sejak akhir 1990-an.[[30]](#footnote-30) Dua doktrin tersebut adalah (1) ”*Kangsong Taeguk*”, yang berarti pemikiran mengenai pentingnya membangun negara yang kuat dan sejahtera dan (2) ”*Songun Chongchi*” atau keutamaan militer.[[31]](#footnote-31)

Menurut pendekatan *domestic politics model*, nuklir menjadi alat politik bagi elit yang mencoba mempengaruhi kebijakan negara. Dalam kasus Korea Utara, militer memegang kendali atas pembuatan keputusan nasional. Di bawah pemerintahan Kim Jong Il, *Korean People’s Army* (KPA) secara pasti menjadi pemain kunci dalam struktur kekuatan Korea Utara. KPA jauh lebih kuat secara politis daripada partai komunis Korea Utara yang dikenal sebagai *Korean Workers Party*. Dominasi Kim Jong Il juga datang dari kedudukannya sebagai pimpinan badan militer *National Defense Commission*, dimana posisinya sebagai presiden dan ketua partai komunis.

Betapa pun kerugian yang dialami Korea Utara ketika secara terbukamendeklarasikan diri sebagai negara bersenjata nuklir, ada strategi yang logisdi balik deklarasi Korea Utara sebagai negara berkekuatan senjata nuklir.Korea Utara percaya tindakan ini akan memberikan keuntungan strategis,simbolis, dan teknologi yang dibutuhkan dalam jangka panjang untukmewujudkan Korea Utara yang kuat dan makmur. Sesuai dengan definisistrategi nuklir sebagai pemanfaatan senjata nuklir untuk meraih kepentinganpolitik internasional, nuklir bagi Korea Utara dapat menjadi alat penting dalam perundingan internasional.

Terdapat beberapa kemungkinan skenario lain untuk menjelaskanmotif pengembangan nuklir Korea Utara.[[32]](#footnote-32) Pertama, Korea Utara inginmemiliki senjata nuklir sebagai tindakan keamanan, Pyongyang tidak akanmenghentikan pengembangan senjata nuklir tanpa mempertimbangkankeuntungan yang akan didapatkan. Kedua, program nuklir hanyalah sebagai alat untuk mempertahankan rezim.

Sedangkan menurut pendapat lain, Korea Utara memiliki tiga motif dalam mengembangkan nuklir. Motif pertama adalah *regime survival*. Sekalipun perang Korea telah berakhir lebih dari lima dasawarsa lalu (1953), perang Korea secara teknis belum berakhir karena situasi perang Korea mereda setelah ditandatanganinya perjanjian gencatan senjata dan bukannya sebuah perjanjian damai. Korea Utara masih merasa terancam dengan penempatan 27 ribu tentara AS di Korea Selatan, ditambah 47 ribu tentara AS lainnya di Jepang. Korea Utara tidak akan melupakan bagaimana China pada dekade 1950-an mengalami tiga kali ancaman serangan nuklir dari AS. Ancaman serangan nuklir pertama dialami China karena bantuan militer China pada Korea Utara saat perang Korea. Dua ancaman lainnya dialami China berkaitan dengan konflik China-Taiwan tahun 1955 dan 1958.[[33]](#footnote-33)

Motif kedua pengembangan senjata nuklir Korea Utara adalah ekonomi. Korea Utara menggunakan program nuklirnya sebagai instrumen untuk memeras negara-negara di sekitarnya memberikan bantuan ekonomi. Konsesi yang diberikan Korea Utara, seperti penghentian sementara program nuklirnya atau izin inspeksi IAEA dilakukan dengan imbalan bantuan makanan dan bahan bakar dari China dan Korea Selatan, serta pembangunan reaktor nuklir sipil di Korea Utara oleh pihak Korea Selatan dan Jepang. Motif ketiga program senjata nuklir Korea Utara adalah untuk mengangkat status politik Korea Utara di mata dunia. Korea Utara selalu ingin bernegosiasi langsung dengan AS dan bukannya Korea Selatan, yang dianggap hanya negara boneka bentukan AS. Dengan bernegosiasi langsung Vis-à-vis AS, Korea Utara memberikan sinyal pada dunia bahwa dirinya adalah lawan yang sepadan dengan AS. Gabungan dari militer, ekonomi dan politik ini membuat Korea Utara sangat unik. Biasanya negara-negara mengembangkan senjata nuklir dengan sangat rahasia untuk menghindari intervensi luar. Namun rezim Korea Utara melakukan hal yang sebaliknya dengan mengakui secara terang-terangan keinginan mereka untuk menjadi negara nuklir.

Terdapat pula empat hipotesis mengenai pengembangan senjata nuklir Korea Utara.[[34]](#footnote-34) Yang pertama adalah hipotesis yang menyatakan pengembangan nuklir ini dimaksudkan sebagai pertahanan militer, dimana senjata nuklir bisa digunakan sebagai sistem penangkal serangan AS dan mengimbangi kekuatan militer Korea Selatan. Pandangan ini diterima oleh banyak penganut liberal Korea Selatan. Berdasarkan hipotesis ini maka untuk mewujudkan denuklirisasi Korea Utara, dihilangkannya ancaman AS melawan Korea Utara merupakan syarat utama.

Ancaman AS yang dirasakan Korea Utara adalah penempatan pasukan AS di Korea Selatan dan jaminan payung nuklir AS di Korea Selatan sehingga berubahnya kedua hal tersebut dapat menyebabkan berakhirnya aliansi AS-Korea Selatan. Hal tersebut cenderung tidak akan terjadi dikarenakan Korea Selatan merasa bahwa denuklirisasi Korea Utara harus didahului dengan melakukan disarmament di Semenanjung Korea.

Yang kedua adalah tujuan diplomatik, yang menyatakan bahwa senjata nuklir digunakan sebagai alat penawar untuk mencapai normalisasi hubungan AS-Korea Utara serta menerima bantuan ekonomi. Jika Korea Utara mendapatkan jaminan keamanan dan pemulihan ekonomi, maka negara tersebut akan menghentikan program nuklirnya.

Ketiga, tujuan politik yang menyatakan bahwa Kim Jong Il menggunakan senjata nuklir untuk meningkatkan prestise politiknya. Meskipun Kim Jong Il mewarisi jabatan ayahnya, dia tidak mewarisi legitimasi politiknya. Selain itu, di bawah kepemimpinannya, perekonomian Korea Utara berada di ambang kehancuran. Berdasarkan hipotesis ini, Kim Jong Il terdesak melakukan pengembangan nuklir dan rudal jarak jauhnya untuk meningkatkan legitimasi politiknya.

Keempat adalah strategi militer ofensif yang menyatakan bahwa senjata nuklir adalah sebuah alat yang menyatukan kedua Korea yang digunakan untuk melawan intervensi militer AS. Jika Korea Utara terancam menggunakan senjata nuklir dalam melawan Korea Selatan, Jepang dan pangkalan militer AS di Guam, maka akan sulit bagi AS untuk mengintervensi secara efektif. Dengan skenario ini maka Korea Utara dapat mengalahkan Korea Selatan dan menyatukannya menjadi satu negara.

Untuk memahami pengembangan nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara, harus dilihat juga struktur politik domestiknya. Hubungan eksternal ataupun kebijakan luar negeri yang dilakukan Korea Utara tidak terlepas dari ideologi *Juche* yang dianutnya. *Juche* ini merupakan ideologi yang menekankan bahwa Korea Utara bebas menentukan nasib diri sendiri serta tidak tergantung dengan negara lain. Menurut Charles Armstrong, Juche adalah *“a general world view that sets the parameters, the outer boundaries, of engagement with the outside world.”*[[35]](#footnote-35) Ideologi ini menegaskanketidakmampuan Pyongyang untuk mempertimbangkan secara mendasar kepentingan nasional jangka panjangnya.

*Juche* juga merupakan ideologi nasionalis terpenting di Korea Utarayang menggantikan Marxisme-Leninisme. Bukan hanya sebagai dasarkebijakan luar negeri, *Juche* juga telah menjadi inti paham sosialisme Korea Utara. *Juche* didefinisikan sebagai bentuk dari sosialisme nasionalis khasKorea Utara yang berjuang untuk mencapai kemerdekaan dan *self-reliance* dibidang politik, ekonomi dan keamanan. Kepemimpinan Korea Utara percaya bahwa *Juche* merupakan hal penting bagi hubungan eksternal danpembenaran seluruh tindakan yang dilakukan Korea Utara.

Sedangkan menurut model aksi-reaksi dalam konsep dinamikapersenjataan, Korea Utara mengembangkan nuklir karena bereaksi terhadapkeadaan di sekitarnya. Asia Timur merupakan kawasan yang penuh denganpersaingan maupun konflik antar negara, seperti China dengan Taiwan, Chinadengan Jepang, serta Korea Utara sendiri dengan Korea Selatan. MasuknyaAS yang beraliansi dengan Jepang dan Korea Selatan juga akhirnya membuatsituasi keamanan regional Asia Timur menjadi semakin penuh kecurigaan.Korea Utara berusaha mempertahankan diri dari ancaman luar dengan mengembangkan nuklir. Namun pada kenyataannya pengembangan senjata nuklir Korea Utara justru semakin membuat situasi keamanan regional Asia Timur yang sudah kompleks menjadi semakin kompleks.

Dari dua model pemicu pengembangan senjata nuklir Korea Utara, model struktur domestik adalah model yang dominan. Hal ini dikarenakan Korea Utara memiliki ideologi *Juche* serta kebijakan *military first* yang selama ini diyakininya sebagai strategi pertahanan diri terbaik untuk mempertahankan negara. Korea Utara selama ini hampir selalu mau untuk diajak bernegosiasi dan menghentikan fasilitas nuklirnya dikarenakan Korea Utara membutuhkan bantuan dari negara luar untuk meningkatkan kesejahteraan negara. Bila Korea Utara mendapatkan jaminan tidak akan diserang oleh AS, mendapatkan bantuan ekonomi dari negara-negara lain, dan diterima dalam komunitas internasional, negara-negara lain menganggap Korea Utara akan menghentikan program nuklirnya. Namun usaha-usaha negosiasi tersebut seringkali gagal dikarenakan perbedaan persepsi masing-masing pihak. Perbedaan ini muncul salah satunya disebabkan oleh rezim yang kuat serta ideologi Korea Utara yang ingin bersikap mandiri dan tidak tergantung dengan negara lain. Oleh sebab itu model struktur domestik merupakan faktor pemicu yang lebih dominan dalam pengembangan nuklir Korea Utara.

* 1. **Kepentingan Nasional Korea Utara**

Beberapa negara di dunia masih menganggap memiliki sebuah senjata nuklir merupakan sebuah keharusan untuk menciptakan keamanan di Negeranya. Senjata nuklir juga di jadikan sebuah senjata “*force multiplier*” untuk melawan ataupun meredam kekuatan musuh sehingga tidak mengherankan sebuah negara akan mengerahkan segala sumber-sumber yang dimilikinya untuk mampu menciptakan senjata nuklir, hal ini lah yang dilakukan oleh Korea Utara walaupun diteng-tengah kecaman dari dunia internasional tetap saja negara tersebut melanjutkan program nuklirnya untuk memenuhi kepentingan nasional.[[36]](#footnote-36)

Korea Utara menjadikan program nuklir sebagai kepentingan nasionalnya bukan tanpa alasan, pertama AS merupakan negara yang menjatuhkan bom atom ke Jepang yang akan sangat berdampak ke Korea Utara, kedua, serangan sporadis AS ke Korea Utara, ketiga kegagalan Uni-Soviet untuk mengimbangi rudal nuklir AS hal ini yang pada akhirnya yang membuat pemangku kebijakan Korea Utara harus berpikir logis untuk memenuhi kebutuhannya secara sendiri yaitu dengan menggambil jalur program nuklir.[[37]](#footnote-37)

Hal lain yang melatar belakangi semangat Korea Utara dalam mengembangkan nuklir adalah untuk mempertahankan rezim yang survival[[38]](#footnote-38), konsekuensi logisnya adalah bahwasannya terjadinya sebuah gencatan senjata antara Korea Selatan dan Korea Utara tidak lantas membuat perang akan berakhir, sehingga dalam hal ini Korea Utara masih merasa terancam, ditambah dengan ditempatkannya kurang lebih 27 ribu tentara AS di Korea Selatan, ditambhan 47 ribu tentara AS lainnya di Jepang. Hal tersebut yang kemudian membuat Korea Utara semakin yakin mengembangkan teknlogi nuklirnya.

Adanya kekuatan nuklir Korea Utara bisa dikatakan sebagai ambisi pemimpin Korea Utara untuk menunjukkan kekuatannya sebagai supreme leader[[39]](#footnote-39). Latar belakang historis Semenanjung Korea memperlihatkan bahwa ancaman keamanan serta konfrontasi akan selalu ada. Tidak hanya dari negara-negara tetangga yang kekuatannya semakin besar, tetapi juga dari negara-negara lain di luar kawasan Asia Timur. Terdapat fakta sejarah bahwa Korea menjadi tempat *proxy war* antara AS dengan Uni Soviet di masa Perang Dingin. Hal ini yang membuat Korea terpisah dan masih memunculkan kekhawatiran Korea Utara terhadap Korea Selatan. Ditambah lagi dengan negara-negara komunis yang dianggap sebagai *axis of evil* yang harus dijinakkan oleh AS. Hal ini menjadi ancaman besar bagi Korea Utara sehingga memunculkan kebijakan Korea Utara agar militer diperkuat. Itu disebut sebagai *Military First Politics* yang dimulai sejak tahun 1990-an[[40]](#footnote-40). Sehingga ada kemauan dari Korea Utara untuk membangun pertahanan militer dengan senjata nuklir.

Faktor lain yang mendasari rasionalitas Korea Utara dalam mengembangkan nuklir adalah kepentingan ekonomi. Cara Korea Utara untuk dapat mempertahankan pembangunan kekuatan militer sekaligus mencari solusi kemiskinan adalah dengan terus mengembangkan nuklirnya. Desakan non-proliferasi dari dunia internasional menjadi kesempatan Korea Utara untuk bernegosiasi tentang materi. Ketika IAEA akan melakukan inspeksi nuklir, Korea Utara mengharapkan adanya imbalan berupa bantuan makanan dan bahan bakar dari China dan Korea Selatan. Untuk melakukan dialog pun, Korea Utara meminta AS mencairkan dana sebesar USD 25 juta yang disimpan di Macau dan sebelumnya telah dibekukan[[41]](#footnote-41). Perlu diketahui bahwa Korea Utara memang memenuhi kebutuhan suplai makanan selain dari produksi dalam negeri dan impor, juga dari bantuan luar negeri. Bantuan-bantuan itu didapat dari badan PBB World Food Programme, AS, Korea SelatanAS, Jepang, dan China[[42]](#footnote-42)

1. ["U.S.: N. Korea Boosting Guerrilla War Capabilities"](http://www.foxnews.com/story/0%2C2933%2C528320%2C00.html). FOX News Network, LLC. 2009-06-23. Diakses tanggal 2009-07-04. Di akses tanggal 2 Februari 2017 [↑](#footnote-ref-1)
2. Sanger, David E. (1991-05-29). ["North Korea Reluctantly Seeks U.N. Seat"](http://www.nytimes.com/1991/05/29/world/north-korea-reluctantly-seeks-un-seat.html). The New York Times Company. Di akses tanggal 2 Februari 2017 [↑](#footnote-ref-2)
3. ["Constitution of North Korea (1972)"](http://en.wikisource.org/wiki/Constitution_of_North_Korea_%281972%29). 1972. Di akses tanggal 2 Februari 2017. [↑](#footnote-ref-3)
4. Reuters. ["Factbox - North, South Korea pledge peace, prosperity"](http://uk.reuters.com/article/worldNews/idUKSEO16392220071004). Di akses tanggal 2 Februari 2017. [↑](#footnote-ref-4)
5. Bruce Cummings, *The Origins of the Korean War, Vol. 1: Liberation and the Emergence of Separate Regimes, 1945–1947*, Princeton University Press. Hal 13 [↑](#footnote-ref-5)
6. Martin, Bradley K. (2004). *Under the Loving Care of the Fatherly Leader: North Korea and the Kim Dynasty*. New York, NY: Thomas Dunne Books +. Hal 22 [↑](#footnote-ref-6)
7. Hermes, Jr., Walter (1966). [*Truce Tent and Fighting Front*](http://www.army.mil/cmh-pg/books/korea/truce/fm.htm). Center of Military History. pp. 2,6,9. [↑](#footnote-ref-7)
8. ["North-South Joint Declaration"](http://www.kcckp.net/en/one/nation.php?1+joint). [*Naenara*](https://id.wikipedia.org/wiki/Naenara). 2000-06-15. Di akses tanggal 2 Februari 2017. [↑](#footnote-ref-8)
9. Reuters. ["Factbox - North, South Korea pledge peace, prosperity"](http://uk.reuters.com/article/worldNews/idUKSEO16392220071004). Di akses tanggal 2 Februari 2017. [↑](#footnote-ref-9)
10. Casey, Steven (2008). *Selling the Korean War: propaganda, politics, and public opinion in the United States, 1950-1953.* Oxford University Press US.  [↑](#footnote-ref-10)
11. Kirkbride, Wayne (1984). *DMZ, a story of the Panmunjom axe murder.* Hollym International Corp. [↑](#footnote-ref-11)
12. Bandow, Doug; Carpenter, Ted Galen (1992). *The U.S.-South Korean alliance: time for a change.* Transaction Publishers. Hlm. 98–99.  [↑](#footnote-ref-12)
13. Kwak, Tae-Hwan; Joo, Seung-Ho (2003). *The Korean peace process and the four powers.* Ashgate Publishing, Ltd. p 43 [↑](#footnote-ref-13)
14. Bury, Chris (November 2000). ["Interview - Madeleine Albright"](http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/clinton/interviews/albright.html). [*Nightline*](https://id.wikipedia.org/wiki/Nightline_%28US_news_program%29)[*Frontline*](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Frontline_(US_TV_series)&action=edit&redlink=1)*, on*[*PBS*](https://id.wikipedia.org/wiki/Public_Broadcasting_Service)*.org*. Di akses tanggal 2 Februari 2017. p 2 [↑](#footnote-ref-14)
15. Malcom Moore (2009-05-28). ["South Korean and US Troops raise alert level over North Korean Threat"](http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/northkorea/5397767/South-Korea-and-US-troops-raise-alert-level-over-North-Korean-threat.html). [*Telegraph*](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Telegraph&action=edit&redlink=1)*Online*. Di akses tanggal 2 Februari 2017. [↑](#footnote-ref-15)
16. Oberdorfer, Don (2005-07-28). ["North Korea: Six-Party Talks Continue"](http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/discussion/2005/07/27/DI2005072701759.html). [*The Washington Post*](https://id.wikipedia.org/wiki/The_Washington_Post)*Online*. Di akses tanggal 2 Februari 2017. [↑](#footnote-ref-16)
17. Kim, Kwang-Tae (2009-06-13). ["North Korea Vows Nuclear Step-Up"](http://news.aol.com/article/north-korea-nuclear-program/506625). *Associated Press*. Di akses tanggal 2 Februari 2017. [↑](#footnote-ref-17)
18. ["U.S. journalists head home from North Korea"](http://www.cnn.com/2009/WORLD/asiapcf/08/04/nkorea.clinton/index.html). CNN.com Di akses tanggal 2 Februari 2017. [↑](#footnote-ref-18)
19. ["Eks Presiden Jimmy Carter Berhasil Bawa WN AS yang Ditahan Korea Utara"](http://www.detiknews.com/read/2010/08/28/070403/1429903/10/eks-presiden-jimmy-carter-berhasil-bawa-wn-as-yang-ditahan-korut). Detik. Di akses tanggal 2 Februari 2017. [↑](#footnote-ref-19)
20. Uk Heo dan Jung-Yeop Woo, “The North Korean Nuclear Crisis: Motives, Progress, and

Prospects,” *Korea Observer*, Vol. 39, No.4, (The Institute of Korean Studies, winter 2008), hlm.

490. [↑](#footnote-ref-20)
21. William J. Perry*, Op. Cit.,* hlm. 490. [↑](#footnote-ref-21)
22. Joseph S. Bermudez, Jr., “A History of Ballistic Missile Development in the DPRK,”

Occasional Paper No. 2, (Center for Nonproliferation Studies, 1999), hlm. 2. [↑](#footnote-ref-22)
23. Jessica Kuhn, ”Global Security Issues in North Korea,” *Multilateralism in Northeast Asia,* (Task

Force, 2010), hlm. 38 [↑](#footnote-ref-23)
24. Byung-joon Ahn, “Semenanjung Korea dan Keamanan Asia Timur,” *Masalah Keamanan Asia,*

(CSIS, 1990), hlm. 159 [↑](#footnote-ref-24)
25. “Missile Overview,” *http://www.nti.org/e\_research/profiles/NK/Missile,* di akses tanggal 2 Februari 2017. [↑](#footnote-ref-25)
26. Etel Solingen, *Nuclear Logics: Contrasting Paths in East Asia and the Middle East*, (Princeton:

Princeton University Press, 2007), hlm . 126. [↑](#footnote-ref-26)
27. “Doctrine,” *http//www.fas.org/nuke/guide/dprk/doctrine/index.html*, di akses tanggal 2 Februari 2017. [↑](#footnote-ref-27)
28. Alexander Y. Mansourouv, “The Origins, Evolution and Future of The North Korean Nuclear

Program”, dalam *Korea and World Affairs,* Vol. XIX No. 1, Spring 1995, hlm. 50. [↑](#footnote-ref-28)
29. Loc. Cit. Tan Er-Win,hlm. 553. [↑](#footnote-ref-29)
30. International Risk, “North Korea’s Nuclear Test: The Logic Behind the Leadership’s Action and

Likely Future Development”, 12 Oktober 2006. [↑](#footnote-ref-30)
31. Scott D. Sagan, “Why Do Stated Build Nuclear Weapon?: Three Models in Search of A Bomb”,

*International Security*, Vol. 21, No. 3 (Winter, 1996-1997), hlm. 497. [↑](#footnote-ref-31)
32. *Ibid.* hlm 498. [↑](#footnote-ref-32)
33. Francis Fukuyama & Kongdan Oh, *The US-Security After The Cold War*, National Defense

research Institute, prepared for the Under Secretary of Defense for policy 1993, hlm. 26-28. [↑](#footnote-ref-33)
34. Lihat jurnal Lim Soo‐Ho, “Motives Behind NK’s Nuclear Weapons and Prospects for Denuclearizations,” SERI Quarterly;Jan2009, Vol. 2 Issue 4, hlm. 118-123 [↑](#footnote-ref-34)
35. C.S Eliot Kang, hlm. 294 [↑](#footnote-ref-35)
36. Andrew o’neil, “Nuclear Proliferation In Northeast Asia; the Quest for Security, (Palgrave Macmillan; Newyork) 2007, hlm 3 [↑](#footnote-ref-36)
37. Ibid, 58 [↑](#footnote-ref-37)
38. Sagan, Scott D., Why Do Stated Build Nuclear Weapon?: Three Models in Search of A Bomb, International Security, Vol. 21, No. 3 (Winter, 1996-1997), hlm. 497. [↑](#footnote-ref-38)
39. Seth, Michael J., 2011. A History of Korea: From Antiquity to Present. [e-book] Lanham: Rowman and Littlefield Publisher, Inc.. [↑](#footnote-ref-39)
40. Park, Ki Tae, 2010. Analyzing North Korea’s Decision-Making Process on its Nuclear Weapons Programs with the Rational Choice and Cognitive Models. Disertasi. Santa Monica: Pardee Rand Graduate School. [↑](#footnote-ref-40)
41. Hartati, Anna Yulia, 2013. Propaganda Nuklir Korea Utara: Studi Perlawanan Korea Utara terhadap AS. Laporan Penelitian. Semarang: Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wahid Hasyim. Hlm 40 [↑](#footnote-ref-41)
42. Haggard, Stephan, dan Marcus Noland, 2005. Hunger and Human Rights: The Politics of Famine in North Korea. [e-book] Washington, DC: U.S. Committee for Human Rights in North Korea. Hlm 12 [↑](#footnote-ref-42)